

PENINGKATAN KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM PENYULUHAN PEMBANGUNAN DALAM MENUMBUHKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT¹

Supriyanto² dan Subejo³

PENDAHULUAN

Lulusan program penyuluhan pembangunan atau secara lebih spesifik lulusan program penyuluhan pertanian sebagai salah satu *stakeholder* dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang sangat sentral dan strategis. Agar dapat menjalankan perannya secara optimal, para lulusan program tersebut dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi yang mampu menumbuhkan dan memfasilitasi masyarakat sebagai *client*-nya dalam proses kehidupan rumah tangganya, kegiatan sosial ekonomi dan kemasyarakatannya melalui pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan.

Bagaimanapun juga membahas tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat pedesaan, sektor pertanian masih merupakan tema utama yang perlu mendapatkan perhatian dengan sangat serius dari berbagai pihak terkait. Meskipun kontribusi sektor pertanian tidak sebesar sektor industri dan jasa namun sektor pertanian menampung dan menghidupi keluarga petani dengan jumlah yang sangat signifikan. Dari data BPS tahun 2002 diketahui sektor pertanian di Indonesia masih merupakan sumber penghidupan yang sangat penting karena masih memberikan lapangan kerja pada sekitar 39,7 juta (43,7%) dari sekitar 90,8 juta angkatan kerja di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan program penyuluhan pembangunan termasuk di dalamnya penyuluhan pertanian, mensyaratkan ada

¹ Makalah untuk Prosiding Semiloka Pengembangan Masyarakat Mandiri: "Ilmu Penyuluhan Pembangunan Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia", PS. Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana IPB, 12 Agustus 2004

² Staf Pengajar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM, Post Graduate dari Rijk University of Ghent-Belgium

³ Staf Pengajar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM, Post Graduate dari The University of Tokyo-Japan (e-mail: Subejo@lycos.com/Subejo@hotmail.com)

beberapa keahlian khusus yang harus dimiliki oleh mereka. Keahlian dalam rekayasa sosial (*social engineering*) yang terkait erat dengan rekayasa ekonomi, rekayasa produksi, rekayasa ekologi menjadi mutlak diperlukan. Apalagi dengan mempertimbangkan bahwa isu pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi semata namun terkait erat dengan aspek-aspek lainnya. Secara lebih jelas, dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat tani, Mubyarto dan Santosa (2003) menyatakan bahwa pertanian (*agriculture*) bukan hanya merupakan aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan bagi petani saja. Namun lebih dari itu, pertanian adalah cara hidup (*way of live*) bagi sebagian besar petani di Indonesia. Oleh karena itu pembahasan mengenai sektor dan sistem pertanian secara utuh, tidak saja petani sebagai *homo economicus*, melainkan juga sebagai *homo socius* dan *homo religius*. Konsekuensi pandangan ini adalah dikaitkannya unsur-unsur nilai sosial-budaya lokal, yang memuat aturan dan pola hubungan sosial, politik, ekonomi dan budaya ke dalam kerangka paradigma pembangunan sistem pertanian. Sehingga perencanaan terhadap perubahan kegiatan pertanian harus pula mempertimbangkan konsep dan dampak perubahan sosial-budaya yang akan terjadi.

Lebih lanjut Mubyarto berpendapat bahwa istilah pertanian (tidak hanya *agribusiness*) tetap relevan dalam pembangunan pertanian tetap merupakan bagian dari pembangunan pedesaan (*rural development*) yang menekankan pada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan penduduk desa, termasuk diantaranya petani. Pembangunan pertanian Indonesia harus berarti pembaruan penataan pertanian yang menyumbangkan pada upaya mengatasi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling kurang beruntung di pedesaan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Terminologi pemberdayaan masyarakat kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*community development*). Dalam prakteknya seringkali terminologi-terminologi tersebut saling tumpang tindih serta kadangkala saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa.

Cook (1994) menggarisbawahi bahwa pembangunan atau secara spesifik “pembangunan masyarakat” adalah merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya

peningkatan atau pengembangan. Ini merupakan tipe tertentu tentang perubahan menuju kearah yang positif. Singkatnya *community development* merupakan suatu tipe tertentu sebagai upaya yang disengaja untuk memacu peningkatan atau pengembangan masyarakat. Sedangkan Giarci (2001) memandang *community development* sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini memfasilitasi penguatan ekonomi lokal dan memungkinkan masyarakat untuk melakukan *collective action* dan melakukan *political pressure* serta membawa usaha-usaha bersama untuk memulai perubahan-perubahan di tingkat lokal dimana *networking* menjadi salah satu kata kuncinya. Bartle (2003) mendefinisikan *community development* sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin kompleks dan kuat. Ini merupakan suatu perubahan sosial dimana masyarakat menjadi lebih kompleks, institusi lokal tumbuh, *collective power*-nya meningkat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya.

Meskipun belum ada kesepakatan dan pengertian yang baku tentang pemberdayaan masyarakat atau yang secara umum juga dikenal dengan *community empowerment*, nampaknya cukup penting dan berguna untuk mengadopsi pengertian pemberdayaan masyarakat yang dirilis oleh Tim Deliveri (2004:1). Proses pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin. Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (*people or community centered development*).

Berdasarkan persinggungan dan saling menggantikannya pengertian tentang *community development* dan *community empowerment*, secara sederhana, Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: **“Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan**

networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial”.

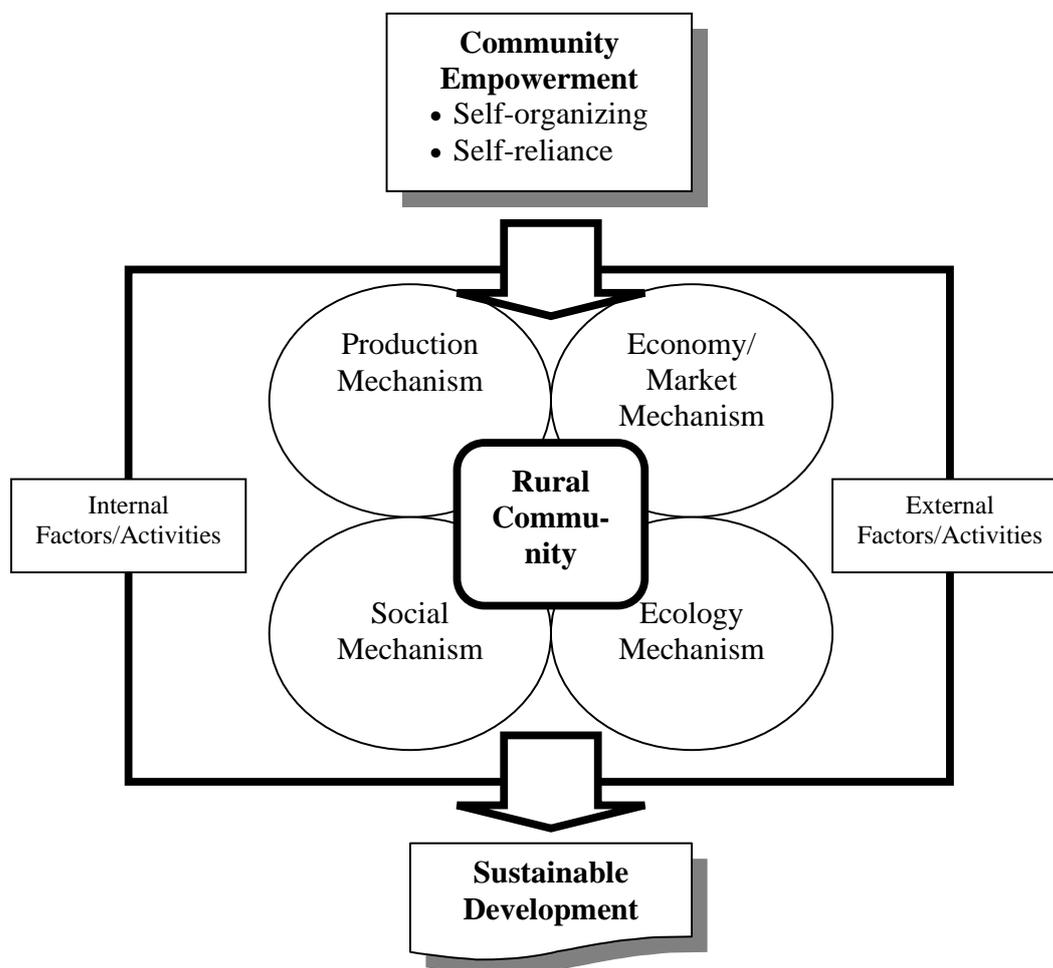
Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.

Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar *memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi-nya*. Secara ringkas keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat dengan *sustainable development* disajikan dalam Gambar 1.

Dalam hal **mekanisme produksi**, masyarakat memiliki sumberdaya produksi yang antara lain mencakup lahan, ternak, modal, peralatan usaha tani serta tenaga kerja. Upaya pemberdayaan semestinya dapat memfasilitasi dan mendorong masyarakat pedesaan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani untuk mampu memanfaatkan sumberdaya produksi yang dimilikinya sehingga mampu memproduksi secara efisien dan menjamin pemenuhan pangan serta memperoleh surplus yang dapat dipasarkan.

Masyarakat umumnya memiliki institusi lokal baik yang dibentuk oleh pemerintah lokal maupun tumbuh alami berdasarkan kesepakatan warga masyarakat sendiri yang sebenarnya dapat dikaitkan dengan usaha-usaha kerjasama produktif. Kegagalan pengorganisasian kelompok masyarakat untuk usaha produksi sering terjadi karena dalam banyak kasus, hal tersebut sering dilatabelakngi oleh target-target keproyekan, umumnya setelah proyek selesai maka kelompok yang terbentuk juga akan bubar. Pada beberapa masyarakat lokal, telah tumbuh beberapa institusi tradisional yang selama ini telah dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai kegiatan produksi yang lebih efisien disesuaikan dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dan atau

dikuasai oleh masyarakat setempat . Dalam studi yang dilakukan Subejo dan Iwamoto (2003), telah dapat diidentifikasi bahwa masyarakat lokal di daerah dataran tinggi Yogyakarta dengan berbagai keterbatasan sumberdaya produksi yang dimilikinya telah mengorganisasikan diri ke dalam kelompok atau grup melalui institusi pertukaran kerja (*labor exchange institutions*) yang ternyata sangat efisien dan efektif dan dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama secara terus menerus. Dalam beberapa kasus bahkan keanggotaan kelompok dapat diwariskan kepada keturunannya, hal ini menjadi mungkin berlangsung karena keeratn hubungan sosial antar warga dalam menyikapi keterbatasan sumberdaya produksi yang dimilikinya.



Gambar 1. Proses dan Keterkaitan Pemberdayaan Masyarakat dan *Sustainable Development*

Terkait dengan **mekanisme pasar/ekonomi**, sebenarnya telah banyak upaya untuk menciptakan institusi ekonomi/pasar dengan maksud meningkatkan akses petani atau masyarakat terhadap pasar. Namun nampaknya kelembagaan ekonomi yang ada belum dapat sepenuhnya memberikan manfaat kepada petani secara ekonomi. Pembentukan koperasi pedesaan yang diarahkan pada penyediaan sarana produksi dan penjualan produk pertanian di beberapa tempat menunjukkan keberhasilan, namun pada banyak kasus justru mengalami kegagalan karena tidak melibatkan masyarakat secara penuh. Manfaat dan keuntungan masih hanya dinikmati secara signifikan oleh pihak manajemen koperasi serta orang-orang dekatnya. Idealnya koperasi petani mampu menyediakan kebutuhan petani baik dalam hal sarana produksi, permodalan maupun pemasaran produk yang ada akhirnya memberikan nilai tambah pada petani atau masyarakat di sekitar lembaga koperasi tersebut berada.

Subejo dan Iwamoto (2003) mengidentifikasi bahwa beberapa institusi lokal-tradisional terkait dengan ekonomi/pasar yang sebenarnya sudah mulai dikembangkan oleh masyarakat secara swadaya (*self-organizing*). Munculnya kelompok simpan pinjam tradisional (arisan) yang secara luas dikenal dengan *rotation saving and credit associations* (ROSCAs) merupakan sumber permodalan lokal antar petani merupakan salah satu wujud pemberdayaan petani secara internal bahkan keberhasilan, peranan dan kontribusinya dalam pembangunan pedesaan telah diakui oleh *World Bank*. Di daerah pegunungan Gunung Kidul dengan keterbatasan sumberdaya alam dan ekonomi, masyarakat lokal secara kreatif menciptakan lembaga institusi lokal yang disebut dengan "*prayaan*"⁴ yang menggabungkan antara prinsip ekonomi pasar dengan keeratn hubungan sosial. Beberapa petani membentuk kelompok kerja dimana tenaga-tenaga dalam kelompok tersebut dapat dijual kepada publik yang mencakup anggota sendiri/*insider* dan atau *outsider* untuk berbagai kegiatan produktif. Institusi lokal tersebut sudah berlangsung puluhan tahun dan sebagian besar tetap dipertahankan karena memberikan solusi terhadap semakin merembesnya ekonomi pasar serta upaya memelihara keeratn hubungan sosial antar warga.

Sadjad (2000) berpendapat bahwa selama ini program pemberdayaan petani secara ekonomi masih *on farm centralism*. Mestinya pemberdayaan lebih diarahkan

⁴ Secara lebih detail, karakteristik, fungsi dan mekanisme kerja dari institusi "*prayaan*" dilaporkan dalam riset Subejo (2004)

supaya tumbuh rekayasa agribisnis sehingga petani desa bisa menjadi pelaku bisnis yang andal dan akhirnya bisa menjadi pusat bisnis masyarakat pedesaan yang menyejahterakan. Pembangunannya harus dari hilir, yaitu pasar yang melalui komponen tengah ialah agroindustri, baru hulunya *on farm business*.

Sustainable development mensyaratkan adanya pengelolaan sumberdaya ekologi secara bijaksana oleh warga masyarakat lokal. Dalam hal ini **mekanisme ekologi** mencakup aspek lingkungan sekitar yang sangat luas bagi masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana masyarakat diberi kesempatan dan didorong untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya ekologi-nya secara berkesinambungan, hal tersebut secara garis besar mencakup fasilitas infrastuktur (saluran irigasi, jembatan, jalan, fasilitas publik lainnya), hutan masyarakat, penggembalaan umum, gunung, sungai dan lain sebagainya. Beberapa ahli banyak memberikan kritik bahwa selama ini masyarakat cenderung hanya dilibatkan sebagai obyek dalam pengelolaan sumberdaya ekologi, mereka jarang sekali dilibatkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan serta pengelolaan sumberdaya ekologi tersebut. Namun hasil penelitian Subejo dan Iwamoto (2003) menunjukkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kearifan dan kemampuan dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya ekologi agar memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Di daerah pegunungan Gunung Kidul dimana fisik ekologi sangat tidak menguntungkan untuk produksi pertanian yang dicirikan dengan perbukitan batuan kapur dan lahan kering, masyarakat lokal telah menciptakan institusi kerja lokal yang bisa difungsikan untuk mengelola sumberdaya ekologi secara optimal dalam hal ini institusi tersebut dapat difungsikan untuk membangun dan memperbaiki teras-teras lahan berbukit untuk budidaya pertanian dan kolam penampungan air (untuk rumah tangga maupun ternak). *Collective action* tersebut selain mampu merubah lahan kritis menjadi lahan produktif juga memberikan kontribusi nyata dalam pelestarian sumberdaya ekologi dan konservasi lahan. Selain hal tersebut, nampaknya pengelolaan sumberdaya ekologi lokal sangat sulit dilakukan secara individual karena memerlukan curahan tenaga kerja yang sangat besar, namun dengan terpeliharanya kearifan komunitas lokal melalui *community based action* telah berhasil mencari solusi permasalahan yang dihadapi.

Terkait dengan **mekanisme sosial**, sebagian besar masyarakat di Indonesia dikenal sebagai salah satu masyarakat di dunia yang mempunyai tradisi komunitarian paling kuat (Scott, 1976). Tradisi komunitarian tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk *social relationship* yang kuat, masyarakat kita telah banyak berinovasi dalam menciptakan *social relationship* yang memberikan manfaat kepada warganya. Para ahli telah mangacu *social relationship* sebagai suatu *networking* yang secara spesifik sering disebut dengan terminologi *social capital* (untuk lebih jelas lihat dalam *homepage World Bank*⁵). Walaupun masih belum ada kesepakatan yang baku tentang pengertian *social capital*, namun sudah ada saling pengertian bahwa *social capital* memiliki peran yang penting dan positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Transaksi-transaksi ekonomi akan berjalan dengan lebih efisien dan efektif jika didukung dengan *social relationship* yang mantap dan kuat.

Secara umum kemampuan *social relationship* di pedesaan kita masih kuat. Sebagai contoh kasus, meskipun di daerah pedesaan yang memiliki mobilitas dan akses tinggi misalnya yang terletak di pinggiran kota, masyarakatnya masih memberikan prioritas yang tinggi terhadap hubungan sosial pada saat kejadian darurat di antara warganya (kematian, kebakaran, longsor, banjir, dan lain sebagainya), pekerjaan untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik, pekerjaan yang terkait dengan permintaan bantuan (pembangunan rumah, upacara-upacara). Di daerah pegunungan umumnya hubungan sosial masih sangat kuat dan mengakar termasuk kesediaan untuk saling membantu dalam pengerjaan usahatani dan pekerjaan rumah tangga lainnya. *Corporate action and function* dari pemimpin-pemimpin lokal juga masih berperan penting dalam mendukung berlangsungnya *social relationship* antar warga masyarakat yang mantap

⁵ Secara khusus World Bank memiliki *website* yang mendokumentasikan dengan detail berbagai kajian dan studi tentang proses dan praktek dan kontribusi dari *social capital* dari berbagai negara dalam berbagai bentuk aktivitas keseharian warga masyarakat. Laporan-laporan hasil studi tersebut dapat diakses secara langsung melalui <http://worldbank.org/poverty/scapital/>

PENINGKATAN KOMPETENSI PENYULUHAN PEMBANGUNAN MENUJU PEMANDIRIAN MASYARAKAT

Konsep tentang pemberdayaan atau pemandirian masyarakat seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pemberdayaan memiliki titik fokus sebagai upaya fasilitasi warga masyarakat agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi.

Untuk memenuhi dasar kompetensinya, para lulusan program penyuluhan pembangunan dituntut agar mampu memahami simbol-simbol perubahan diri dalam masyarakat, dimana secara umum anggota masyarakat melakukan sosialisasi, internalisasi serta mengembangkan nilai-nilai sebagai tataran/ukuran kelayakan kehidupan yang tercermin dalam perilakunya dalam berbagai aspek kehidupan. Lulusan program tersebut sebagaimana tuntutan standar kompetensinya, seharusnya memiliki keahlian standar dalam rangka menumbuhkan dan memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat.

Terkait dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mekanisme produksi, lulusan seharusnya memiliki kompetensi dasar tentang pengetahuan standar teknis produksi pertanian. Dalam hal mekanisme pasar, para lulusan hendaknya memiliki kompetensi pengetahuan dalam hal usahatani, *home economic*, pemasaran produksi pertanian dan *institutional economic*. Keahlian yang diperlukan untuk memfasilitasi masyarakat tani dapat menempatkan diri dalam mekanisme ekologi antara lain pengetahuan tentang ekologi sumberdaya pertanian serta ekologi manusia. Sebagai bagian yang sangat krusial dalam upaya rekayasa sosial adalah kompetensi untuk memfasilitasi kemampuan dalam mekanisme sosial, lulusan diarahkan untuk menguasai perencanaan, metode dan evaluasi program penyuluhan; sosiologi pedesaan dan atau sosiologi pertanian; perubahan sosial; rekayasa sosial; *social marketing*; antropologi pertanian serta pengetahuan dasar tentang hubungan dan interaksi sosial yang saat ini dikenal luas sebagai "*social capital*".

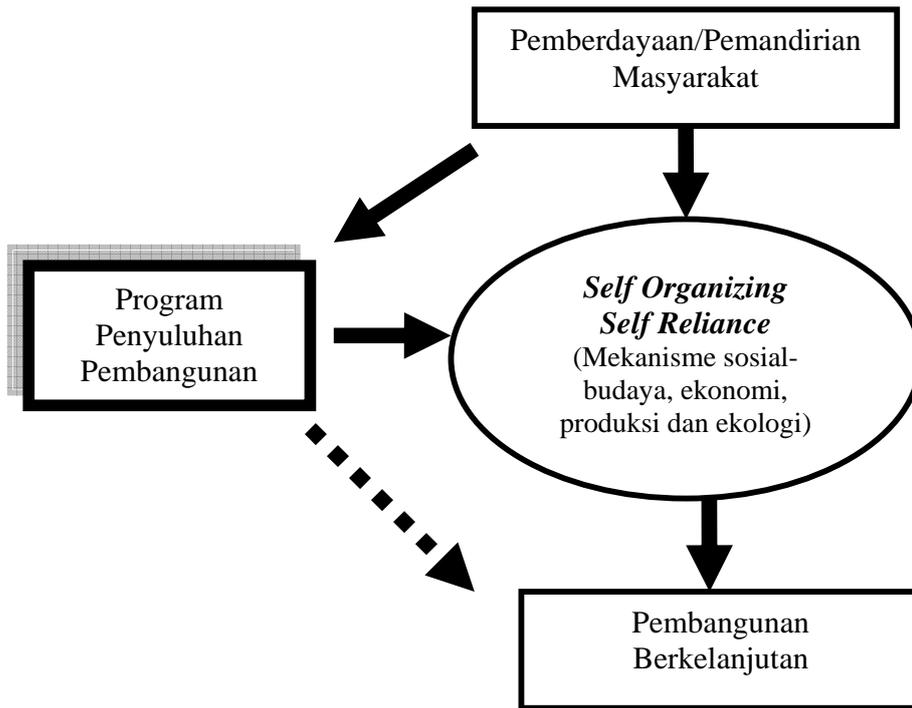
Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki lulusan program penyuluhan pembangunan yang secara garis besar telah diuraikan tersebut semestinya dijabarkan dalam kurikulum yang dipergunakan dalam proses pembelajaran secara formal di

perguruan tinggi. Secara ringkas, konsep keterkaitan antara kompetensi program penyuluhan pembangunan dan pemberdayaan atau pemandirian masyarakat disajikan pada Gambar 2.

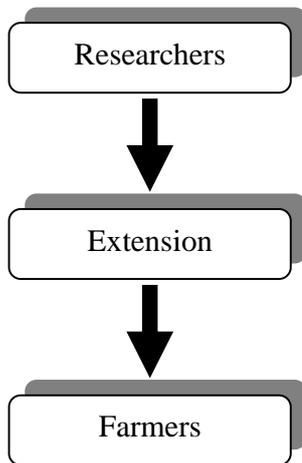
Program penyuluhan pembangunan juga dituntut untuk menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kompetensi tinggi. Secara lebih operasional, Antholt (1998:363) memberikan beberapa acuan dasar dalam proses rekrutmen tenaga profesional baru penyuluhan dari lulusan program penyuluhan pembangunan. Para profesional baru tersebut hendaknya memiliki kapasitas-kapasitas tertentu yang antara lain meliputi : (1) mampu bekerja dalam kondisi yang kompleks dan jadwal yang padat dengan sedikit supervisi, (2) mampu mendengarkan dan belajar dari petani/masyarakat binaanya, (3) mampu mendiagnosis masalah-masalah yang dihadapi petani secara efektif, (4) mampu berkomunikasi secara efektif dan bekerja dengan petani dan kelompok tani dan (5) memiliki wawasan yang luas sehingga bisa menunjukkan alternatif atau pilihan berdasarkan konsep pembangunan pertanian yang handal sehingga memperluas pilihan yang tersedia untuk petani atau *client*-nya.

Selain itu para lulusan program penyuluhan pembangunan seharusnya memiliki kemampuan untuk membangun *interlinkage* dengan lembaga-lembaga penelitian serta pihak lain terkait. Kaimowitz (1991) dalam Antholt (1998:362) mengidentifikasi lima mekanisme kerjasama dan *interlinkage* antara penyuluh dan peneliti. Mekanisme tersebut antara lain berperan penting dalam hal: (1) mengintegrasikan organisasi, (2) menciptakan unit kerjasama, (3) mengorganisasi kepanitiaan untuk tujuan koordinasi, (4) mengirimkan atau memiliki anggota-anggota pada masing-masing institusi yang mengadakan kegiatan bersama dan (5) untuk menciptakan komunikasi yang lebih baik.

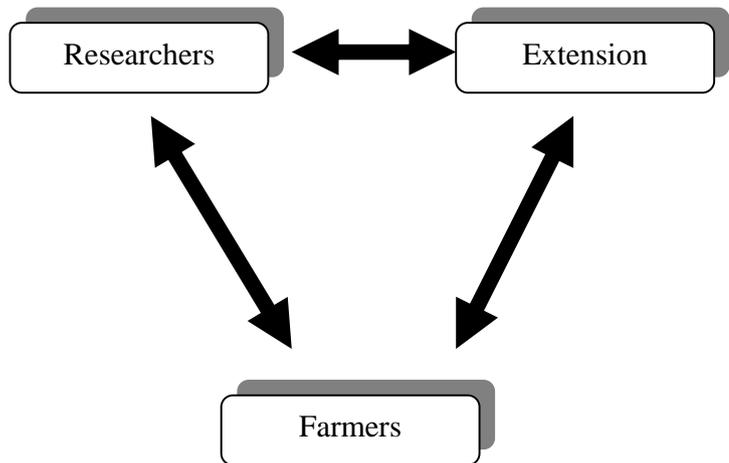
Program penyuluhan pembangunan khususnya terkait dengan pertanian mestinya juga membekali lulusannya dengan paradigma baru tentang *interlinkage* antara petani, penyuluh, dan peneliti yang tidak lagi *linier model* namun berubah menjadi *triangular model*. IFAD (1995) meng gambarkannya secara skematis pada Gambar 3 dan 4.



Gambar 2. Keterkaitan Program Penyuluhan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat



Gambar 3. Linear Relationship Model (Sumber: IFAP,1995:13)



Gambar 4. Triangular Relationship Model (Sumber: IFAP,1995:13)

Paradigma baru dalam pelayanan sistim penyuluhan yang hendaknya juga dikenalkan dan dipahami oleh lulusan penyuluhan pembangunan adalah reorientasi sistim penyediaan layanan dan pendanaan pada sistim penyebaran informasi pertanian. Revitalisasi dan peningkatan kinerja kelembagaan dan petugas penyuluh pertanian lapangan nampaknya akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan SDM pertanian. Selain itu pemberian ruang yang cukup untuk sektor swasta/*private* yang oleh para ahli sedang gencar didengungkan dan dikenal dengan "*privatization of agricultural extension*" dalam distribusi informasi pertanian akan mendorong terciptanya penyediaan dan penyampaian informasi pertanian yang lebih efisien dan efektif. Privatisasi dalam bidang penyuluhan pertanian semestinya bukan dimaknai sebagai penyerahan aset-aset penyuluhan dari sektor public/pemerintah kepada sektor *private*, namun lebih ditekankan pada pembagian peran yang serasi dalam rangka meningkatkan "efektifitas dan kinerja" layanan dalam iklim kompetisi yang sehat produktif. Alex, G. *et.al*, (2002) menggambarkan suatu model pembagian peran antara *public* dan *private* dalam penyediaan sumber dana dan pelayanan penyuluhan pertanian secara rinci dapat diperjelas dengan suatu matrik pada Gambar 5.

		Sumber Pendanaan		
		Public	Private (Petani)	Private (Lainya)
Penyedia Layanan	Public	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan konvensional 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fee</i> untuk layanan penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrak dengan <i>public institutions</i>
	Private	<ul style="list-style-type: none"> • Subsidi untuk penyedia layanan penyuluhan • Kontrak dengan pendanaan publik untuk layanan penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan konsultasi yang komersial • Penjualan majalah, surat kabar, informasi tercetak 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi disediakan dengan penjualan input • Penyuluhan disediakan oleh kontraktor • Iklan di surat kabar, radio, TV, dan majalah

Gambar 5. Alternatif Pendanaan dan Penyediaan Layanan Penyuluhan Pertanian

PENUTUP

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat *top-down* perlu direorientasikan menuju pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan atau oleh Chambers dalam Anholt (2001) sering dikenal dengan semboyan "*put the farmers first*". Menurut Nasikun (2000:27) paradigma pembangunan yang baru tersebut juga harus berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya; termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya. Dengan semua itu jaminan bahwa distribusi keuntungan dan manfaat yang lebih adil bagi masyarakat dari operasinya akan dapat diletakkan dengan lebih kokoh.

Program penyuluhan pembangunan sebagai salah satu institusi yang memiliki peran penting dalam menghasilkan para lulusannya mestinya mampu membekali peserta didiknya dengan kompetensi standar yang dapat dipergunakan dalam proses fasilitasi masyarakat *client*-nya menuju masyarakat yang mandiri secara berkelanjutan.

Kompetensi standar untuk menumbuhkan dan memfasilitasi proses pemberdayaan dan pemandirian masyarakat tersebut perlu dijabarkan secara lebih operasional dalam bentuk kurikulum pembelajaran. Seperti telah diuraikan sebelumnya, nampaknya ada beberapa pengetahuan yang harus dikuasai oleh para mahasiswa program penyuluhan pembangunan sehingga kompetensi standarnya dapat dicapai. Pengetahuan dasar tersebut antara lain mencakup: pengetahuan teknis produksi pertanian; usahatani; *home economic*; pemasaran produksi pertanian; *institutional economic*; ekologi sumberdaya pertanian; ekologi manusia; perencanaan, metode dan evaluasi program penyuluhan; sosiologi pedesaan dan atau sosiologi pertanian; perubahan sosial; rekayasa sosial; *social marketing*; antropologi pertanian serta *human relationship* atau *social capital*.

Paradigma baru tentang *interlinkage* antara penyuluh, peneliti serta anggota masyarakat sebagai "*triangular model*" seharusnya juga menjadi salah satu isu yang

perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran pada program penyuluhan pembangunan; selain itu, pemahaman tentang pembagian peran antara sektor *public* dan *private* dalam sistim penyediaan layanan dan pendanaan kegiatan penyuluhan perlu untuk terus dikembangkan.

DAFTAR PUSATAKA

- Alex. G. *et.al*, 2002. *Rural Extension and Advisory Service: New Direction dalam Rural Development Strategy Background Paper # 9*, Washington. D.C.: Agriculture and Rural Development. World Bank.
- Antholt, C.H. 1998. *Agricultural Extension in the Twenty-First Century* dalam Eicher and Staatz (ed). 1998. *International Agricultural Development*. Third Edition. Johns Hopkins.
- Bartle, Phil, 2003, *Key Words C of Community Development, Empowerment, Participation*: <http://www.scn.org/ip/cds/cmp/key-c.htm>).
- Biro Pusat Statistik Jakarta. 2002. *Employment* dalam Biro Pusat Statistik *online://www.bps.go.id/sector/employ/table2.html*
- Cook, James B, 1994, *Community Development Theory*, Community Development Publication MP568, Dept. of Community Development, University of Missouri-Columbia).
- Delivery, 2004, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Praktek*, p1, http://www.deliveri.org/guidelines/how/hm_7/hm_7_summaryi.htm.
- Giarsi, G.G, 2001, *Caught in Nets: A Critical Examination of the Use of the Concept of "Network" in Community Development Studies*, *Community Development Journal* Vol.36 (1): 63-71, January 2001 , Oxford University Press.
- IFAP, 1995, *Negotiating Linkages: Farmers' Organizastions, Agricultural Research and Extension*, International Federation of Agricultural Producers (IFAP), Paris, France.
- Mubyarto dan Santosa, Awan, 2003, *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan: Kritik Terhadap Paradigma Agribisnis*, *Jurnal Ekonomi Rakyat* Th II No.3 Mei 2003
- Nasikun, 2000, *Globalisasi dan Paradigma Baru Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas* dalam Fandeli, C dan Mukhlison (eds.), *Pengusahaan Ekowisata*, Fakultas Kehutanan UGM dan Pustaka Pelajar.
- Sadjad, Sjamsoe`oed, 2000, *Memberdayakan Petani Desa*, Kompas 22 September 2000.

Scott, James C, 1976, *The Moral Economy of The Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, New Heaven and London, Yale University Press.

Subejo dan Supriyanto, 2004, *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*, Short paper disampaikan pada Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, *Study on Rural Empowerment (SOREm)*--Dewan Mahasiswa Fak. Pertanian UGM tanggal 16 Mei 2004.

Subejo, 2004, *Customs of Mutual Help in Rural Java: A Case Study of Gotong Royong Practices in Yogyakarta Province*, Thesis Master pada Department of Agriculture and Resource Economics, The University of Tokyo (tidak dipublikasikan).

Subejo dan Iwamoto, Noriaki, 2003, *Labor Institutions in Rural Java: A Case Study in Yogyakarta Province*, Working Paper Series No. 03-H-01, Department of Agriculture and Resource Economics, The University of Tokyo.